

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan melihat teori-teori pendukung dalam menyelesaikan pencemaran lintas batas Negara yang terjadi di Laut Timor yang sangat merugikan masyarakat pesisir laut timor dalam hal ini Pemerintah Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Perusahaan Minyak PTTEP Australasia dapat diberi pertanggungjawaban dalam artian *strict liability* mengingat dampak akibat dari bocornya ladang minyak blok west Australia yang tumpahan minyaknya mencemari lautan timor dan melintasi batas negara sampai ke teritorial Indonesia. Ini adalah konsekuensi yuridis dari perbuatan melanggar hukum internasional.
2. Pemerintahan Australia harus melakukan pencegahan sebagai bentuk pertanggungjawaban (*responsibility*) atau tindakan-tindakan yang menormalkan pencemaran limbah minyak yang mencemari negara lain sesuai dengan ketentuan internasional yakni Pasal 139, 192, dan 235 Konvensi Hukum Laut 1982
3. Pemerintahan Australia tidak menerapkan prinsip bertetangga yang baik dalam hukum internasional, ini dikarenakan adanya pendiaman dari Pemerintahan Australia dan terkesan lambat untuk mengatasi agar pencemaran tersebut tidak berdampak buruk bagi negara lain.

4. Pemerintah Indonesia terkesan tidak mampu melindungi masyarakat pesisir di Laut Timor sesuai amanah Undang-Undang No 32 Tahun 2009 ini disebabkan wilayah perairannya menjadi tercemar oleh tumpahan minyak yang diakibatkan meledaknya ladang minyak Perusahaan Montara Thailand-PTTEP Australasia diluar yurisdiksinya. Namun setelah memenuhi syarat pelanggaran pencemaran laut berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982
5. Kebijakan Luar Negeri Indonesia dapat di analisis berdasarkan Teori Game Two Level bahwa Pemerintah Indonesia seperti sedang bermain catur atau kartu dengan mencoba mengesampingkan penyelesaian pencemaran lintas batas Negara dikarenakan pada saat itu Pemerintah Indonesia lebih memilih penyelesaian kasus dengan Pemerintah Australia yang lebih prioritas yakni kasus pencari suaka kelompok siparatis Papua dan kasus penyadapan Ibu Anie Yudhoyono yang dianggap memiliki peran penting mempengaruhi kekuasaan pada saat itu.